

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAMUJU TENGAH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR: 031/KPG/04/2025 **TENTANG**

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. Bahwa standar pelayanan statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah belum ditetapkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- h. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- j. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

n. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN

MAMUJU TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

KESATU : Standar pelayanan publik menurut jenis layanan secara lengkap

sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak

Pada Tanggal : 28 April 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

JJU TENGAH,

UNDARI BUDIANI

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 031/KPG/04/2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

A. STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN MAMUJU TENGAH

1. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
	_	
1.	Persyaratan	 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Mamuju Tengah b) Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain) c) Pengguna layanan memiliki nomor HP dan alamat <i>email</i> yang masih aktif d) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik
		 2) Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi PST https://pst.bps.go.id
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah b) Pengguna layanan mengambil nomor antrian c) Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian d) Pengguna layanan menuju meja layanan saat dipanggil oleh petugas e) Petugas layanan mengisi buku tamu elektronik f) Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas ke petugas frontline untuk penggunaan loker (opsional) g) Pengguna layanan meletakkan tas pada loker (opsional)

No.	Komponen	Uraian
		h) Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut: 1. Layanan Perpustakaan Tercetak Pengguna layanan membaca pustaka hardcopy pada ruang pelayanan perpustakaan tercetak Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy menggunakan sarana scanner pustaka 2. Layanan Perpustakaan Digital Pengguna layanan membaca pustaka softcopy pada aplikasi pelayanan Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy dengan cara mengisi form permintaan dan memperoleh pustaka softcopy pada aplikasi pelayanan. i) Pengguna layanan mengisi survei kepuasan j) Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan 2) Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi PST http://pst.bps.go.id b) Pengguna layanan melakukan registrasi (jika belum mempunyai akun) c) Pengguna layanan login ke aplikasi PST d) Pengguna layanan mencari/searching pustaka yang dibutuhkan e) Pengguna layanan membaca pustaka softcopy f) Pengguna layanan membaca pustaka softcopy ber-watermark melalui menu unduh g) Pengguna layanan mengisi survei kepuasan h) Pengguna layanan selesai mengakses layanan
3.	Jangka Waktu	perpustakaan 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung
	Pelayanan	Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu elektronik 2) Layanan dengan cara <i>online</i> Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada aplikasi pelayanan
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

No.	Komponen		Uraian
5.	Produk Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung Pustaka hardcopy dan softcopy ber-watermark Layanan dengan cara online Pustaka softcopy ber-watermark	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Langsung P Whistleblowing: S. System Whatsapp: 0 Media Sosial: B Email: b Website: S.	Kotak Saran dan Pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah .bps.go.id/WBSmateng 1822-1000-7606 BPS Kabupaten Mamuju Tengah .ps7606@bps.go.id .bps.go.id/SaranPengaduan bps7606 www.lapor.go.id

2. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
		39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
		2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
		Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5038);
		4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
		Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
		5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5357);

No.	Komponen	Uraian
		 6) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Komputer 2) Meja 3) Kursi 4) Nomor Antrian 5) Printer & Scanner 6) Buku/pustaka hardcopy 7) File pustaka softcopy ber-watermark 8) Jaringan Intranet/Internet 9) Aplikasi pelayanan 10) Ruang tunggu pelayanan 11) Toilet pengguna 12) Arena bermain anak 13) Tongkat/kruk 14) Tempat parkir tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memahami tugas dan kewenangan. Memiliki keterampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik serta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang setiap bulan. Penanganan pengaduan yang diterima dilakukan oleh tim pengaduan sesuai Surat Keputusan Kepala BPS Kabupaten Mamuju Tengah yang berlaku.

No.	Komponen	Uraian	
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penetapan Standar Pelayanan disertai Penetapan Maklumat Pelayanan. 	
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Unit pelayanan dilengkapi dengan petunjuk arah keselamatan dan petugas keamanan. 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu- waktu. Evaluasi kinerja pelayanan juga dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dalam bentuk Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dilakukan sepanjang tahun SKD menghasilkan Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). 	

B. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN MAMUJU TENGAH

1. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Mamuju Tengah Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain) Pengguna layanan memiliki nomor HP dan alamat email yang masih aktif Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas Layanan dengan cara online melalui website Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi PST http://pst.bps.go.id Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi PST Layanan dengan cara online melalui Whatsapp Pengguna layanan memiliki akun Whatsapp Pengguna layanan melakukan konsultasi melalui chat ke nomor Whatsapp Layanan 0822-1000-7606 Layanan dengan cara online melalui Email Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif Pengguna layanan melakukan konsultasi statistik melalui email layanan BPS Kabupaten Mamuju Tengah bps7606@bps.go.id
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah Pengguna layanan mengambil nomor antrian Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian Pengguna layanan menuju meja layanan saat dipanggil oleh petugas

No.	Komponen	Uraian
		e) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik
		f) Pengguna layanan menyampaikan konsultasi kepada
		petugas
		g) Petugas memberikan informasi berkaitan dengan
		materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
		h) Jika pengguna layanan perlu menindaklanjuti informasi
		tersebut untuk mendapatkan produk-produk
		pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis
		layanan lainnya pada PST
		i) Pengguna layanan mengisi survei kepuasan
		j) Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik
		2) Layanan dengan cara <i>online</i> melalui <i>website</i>
		a) Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi
		statistik melalui aplikasi PST di tautan
		https://pst.bps.go.id lalu memilih layanan "Konsultasi"
		b) Pengguna layanan melakukan registrasi (jika belum
		memiliki akun)
		c) Pengguna layanan login ke aplikasi PST
		d) Pengguna layanan mencari/searching informasi
		tentang materi yang ingin dikonsultasikan
		e) Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan
		dapat membuat transaksi konsultasi statistik
		f) Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui
		percakapan <i>online</i>
		g) Petugas memberikan informasi berkaitan dengan
		materi yang dikonsultasikan pengguna layanan h) Petugas layanan menutup percakapan <i>online</i> jika
		layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan
		tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari
		i) Pengguna layanan mengisi survei kepuasan
		j) Pengguna layanan selesai mengakses layanan
		konsultasi statistik
		3) Layanan dengan cara online melalui Whatsapp
		a) Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi
		statistik melalui chat Whatsapp ke petugas layanan
		b) Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai
		antrian chat yang masuk
		c) Pengguna layanan menyampaikan konsultasi kepada
		petugas
	<u> </u>	d) Pengguna layanan memberikan informasi identitas

No.	Komponen	Uraian
		e) Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan f) Jika pengguna layanan perlu menindaklanjuti informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada PST g) Pengguna layanan mengisi survei kepuasan h) Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik 4) Layanan dengan cara online melalui Email a) Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui email b) Pengguna layanan menuliskan rincian konsultasi melalui email c) Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan d) Jika pengguna layanan perlu menindaklanjuti informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya pada PST e) Pengguna layanan mengisi survei kepuasan f) Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai. Layanan dengan cara online melalui website Pengguna layanan akan dilayani maksimal 1 (satu) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap Layanan dengan cara online melalui Whatsapp Pengguna layanan akan dilayani maksimal 1 (satu) hari kerja untuk respon awal dari konsultasi yang dilakukan. Layanan dengan cara online melalui email Pengguna layanan akan dilayani maksimal 1 (satu) hari kerja sejak email diterima.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik

No.	Komponen			Uraian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung Whistleblowing System Whatsapp Media Sosial Email Website SP4N-Lapor	: : : : : :	Kotak Saran dan Pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah s.bps.go.id/WBSmateng 0822-1000-7606 BPS Kabupaten Mamuju Tengah bps7606@bps.go.id s.bps.go.id/SaranPengaduan bps7606 www.lapor.go.id

2. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
		Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 3683);
		2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
		Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
		Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
		5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		6) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang
		Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

No.	Komponen	Uraian
		 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer Meja Kursi Nomor Antrian Printer & Scanner Buku/pustaka hardcopy File pustaka softcopy ber-watermark Jaringan Intranet/Internet Aplikasi pelayanan Ruang tunggu pelayanan Toilet pengguna Arena bermain anak Tongkat/kruk Tempat parkir tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memahami tugas dan kewenangan. Memiliki keterampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan.
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik serta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang setiap bulan. Penanganan pengaduan yang diterima dilakukan oleh tim pengaduan sesuai Surat Keputusan Kepala BPS Kabupaten Mamuju Tengah yang berlaku.

No.	Komponen	Uraian	
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penetapan Standar Pelayanan disertai Penetapan Maklumat Pelayanan. 	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Unit pelayanan dilengkapi dengan petunjuk arah keselamatan dan petugas keamanan. 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu- waktu. Evaluasi kinerja pelayanan juga dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dalam bentuk Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dilakukan sepanjang tahun. SKD menghasilkan Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). 	

C. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN MAMUJU TENGAH

1. Komponen Service Delivery

No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Mamuju Tengah b) Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain) c) Pengguna layanan memiliki nomor HP dan alamat email yang masih aktif d) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik e) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas f) Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy 	
		 2) Layanan dengan cara online a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi PST http://pst.bps.go.id c) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi PST d) Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy 	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah b) Pengguna layanan mengambil nomor antrian c) Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian d) Pengguna layanan menuju meja layanan saat dipanggil oleh petugas e) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik	

No.	Komponen	Uraian	
		f) Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas	
		g) Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna	
		layanan h) Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Jl. Trans Sulawesi Dusun Manurung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten	
		Mamuju Tengah. <i>Email</i> : bps7606@bps.go.id i) Petugas mendampingi pengguna layanan melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi PST j) Pengguna layanan mengirim formulir pada aplikasi	
		PST dan dilakukan pemeriksaan oleh Walidata k) Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan	
		hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas l) Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan m) Kepala BPS Kabupaten Mamuju Tengah menerbitkan	
		surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan n) Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan	
		statistik kepada pengguna layanan o) Pengguna layanan mengisi survei kepuasan p) Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik	
		2) Layanan dengan cara <i>online</i> a) Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi PST https://pst.bps.go.id lalu memilih layakan	
		"Rekomendasi"b) Pengguna layanan melakukan registrasi (jika belum memiliki akun)c) Pengguna layanan login ke aplikasi PST	

No.	Komponen	Uraian	
		d) Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan	
		statistik yang akan dilakukan e) Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi PST	
		f) Pengguna layanan mengirim formulir pada aplikasi PST dan dilakukan pemeriksaan oleh Walidata	
		g) Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas	
		h) Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan	
		i) Kepala BPS Kabupaten Mamuju Tengah menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan	
		j) Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan	
		 k) Pengguna layanan mengisi survei kepuasan l) Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima <i>email</i> notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya	
5.	Produk Pelayanan	 Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik Surat rekomendasi kegiatan statistik 	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan : Kotak Saran dan Pengaduan pada unit Langsung PST BPS Kabupaten Mamuju Tengah Whistleblowing : s.bps.go.id/WBSmateng System	
		Whatsapp : 0822-1000-7606 Media Sosial : BPS Kabupaten Mamuju Tengah	
		Email : bps7606@bps.go.id	

No.	Komponen		Uraian
		<i>Website</i> SP4N-Lapor	s.bps.go.id/SaranPengaduan_bps7606www.lapor.go.id

2. Komponen Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
		2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
		5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		6) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
		7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		8) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

No.	Komponen	Uraian	
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer Meja Kursi Nomor Antrian Printer & Scanner Buku/pustaka hardcopy File pustaka softcopy ber-watermark Jaringan Intranet/Internet Aplikasi pelayanan Ruang tunggu pelayanan Toilet pengguna Arena bermain anak Tongkat/kruk Tempat parkir tamu 	
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memahami tugas dan kewenangan. Memiliki keterampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan. 	
4.	Pengawasan Internal	 Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik serta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang setiap bulan. Penanganan pengaduan yang diterima dilakukan oleh tim pengaduan sesuai Surat Keputusan Kepala BPS Kabupaten Mamuju Tengah yang berlaku. 	
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.	
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penetapan Standar Pelayanan disertai Penetapan Maklumat Pelayanan. 	

No.	Komponen	Uraian
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Unit pelayanan dilengkapi dengan petunjuk arah keselamatan dan petugas keamanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu- waktu. Evaluasi kinerja pelayanan juga dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat dalam bentuk Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dilakukan sepanjang tahun. SKD menghasilkan Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).